

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan dan pembangunan suatu bangsa dalam pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*. Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna (Darwin, 2010). Upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang seimbang antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah melalui otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu sistem yang telah berjalan selama kurang lebih dua puluh tahun di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alasan diberlakukannya otonomi daerah karena Indonesia merupakan negara yang sangat beragam dan kaya akan sumber daya serta potensi yang ada sehingga memiliki keunikan pada masing-masing daerahnya. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan salah satu cara agar masing-masing daerah mendapatkan kesejahteraan langsung yaitu dengan mengurus urusan rumah tangganya masing-masing atau biasa dikenal sebagai desentralisasi. Sistem desentralisasi sendiri dianggap dan dinilai jauh lebih efektif dibandingkan sistem terdahulu yang sifatnya terpusat pada pemerintah pusat.

Menurut Ahmad Yani dalam Siti Khodijah (2019), konsekuensi tersendiri dari adanya otonomi daerah adalah tidak adanya dominasi pemerintah pusat terhadap keputusan pemerintah daerah dalam segala faktor pembangunan daerah seperti menentukan jumlah dan alokasi dana. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat menggali dan meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan yang independen, misalnya pajak daerah dan retribusi daerah. Besaran jumlah dana yang diperlukan pemerintah daerah untuk pelayanan publik sangat bergantung pada luas wilayah, keadaan geografis, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, kompleksitas kebutuhan penduduk serta hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan sosial ekonomi daerah tersebut.

Kemandirian sebuah daerah dapat tercermin dari pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut dikarenakan PAD menjadi hal paling penting dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sumber-sumber penerimaan daerah berasal dari PAD, dana perimbangan, dan pendapatan daerah yang sah. Jenis-jenis PAD sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Semakin besarnya PAD maka wilayah itu akan semakin independen ditandai dengan ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang akan semakin berkurang. Namun pada kenyataannya kebanyakan wilayah tersebut masih

dihadapkan pada ketergantungan fiskal yang berupa subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat dikarenakan terbatasnya PAD yang dimilikinya. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya, salah satunya dapat diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah (Halim, 2004).

Salah satu upaya untuk meningkatkan PAD adalah dengan mengembangkan potensi yang ada pada daerah tersebut. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah (Luviana, 2018). Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata menjadi hal yang sangat penting. Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan.

World Bank dan World Travel and Tourism Council (2016) membubuhkan data bahwa industri pariwisata di Indonesia telah menyumbang sebesar 10% dari total produk domestik bruto (PDB), penyumbang devisa nasional sebesar 9,3% dan membuka 9,8 juta lapangan kerja. Angka tersebut tentu akan semakin meningkat di tahun-tahun selanjutnya jika pengelolaan sistem otonomi daerah yang semakin baik dan mampu memanfaatkan sektor pariwisata secara maksimal (Novandre, 2019)

Secara garis besar peran pariwisata meliputi tiga aspek, antara lain aspek ekonomis (sumber devisa dan pajak-pajak), aspek sosial (menciptakan lapangan pekerjaan), dan aspek kebudayaan (mempromosikan kebudayaan kepada wisatawan asing). Pada perekonomian sebuah negara apabila dibangun dengan terencana dan terintegrasi, maka fungsi sektor pariwisata akan melampaui sektor migas serta industri yang lainnya.

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak objek wisata adalah Provinsi Jawa Barat wilayah Priangan Timur yang terdiri dari Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar dan Kota Tasikmalaya. Priangan Timur merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang menawarkan berbagai jenis objek wisata alam wisata budaya dan industri kreatif. Setiap kabupaten/kota di Priangan Timur pada umumnya mempunyai potensi pariwisata yang unik, dengan keunikan pariwisata tersebut diharapkan mampu untuk menjadi daya tarik wisatawan sehingga akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Adapun data PAD sektor pariwisata di Priangan Timur tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 PAD Pariwisata di Priangan Timur Tahun 2019-2021 (Rupiah)

	2019	2020	2021
Kab. Ciamis	5.466.978.515	5.197.660.535	5.580.893.319
Kab. Garut	27.021.308.205	22.343.983.523	26.894.791.529
Kab. Pangandaran	27.913.141.932	26.786.568.250	29.846.477.540
Kab. Tasikmalaya	5.208.869.536	4.858.302.824	6.121.720.501
Kota Banjar	1.918.042.561	1.929.750.738	2.081.544.741
Kota Tasikmalaya	28.324.544.807	21.769.219.388	24.224.256.332

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, diolah

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Kabupaten Pangandaran mempunyai PAD pariwisata yang tertinggi dibandingkan kota/kabupaten lainnya di Priangan Timur. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Pangandaran mempunyai potensi pariwisata yang lebih besar sehingga akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan sektor pariwisata. Sementara daerah dengan PAD pariwisata terkecil berada di Kota Banjar. Hal ini dikarenakan potensi pariwisata Kota Banjar masih minim dibandingkan dengan wilayah lainnya di Priangan Timur.

Pada industri pariwisata jumlah kunjungan wisatawan juga merupakan faktor pendukung dimana semakin banyak wisatawan yang berkunjung maka akan semakin memaksimalkan pendapatan sektor pariwisata. Berikut merupakan jumlah kunjungan wisatawan di Priangan Timur tahun 2019-2021:

Tabel 1.2 Jumlah Wisatawan di Priangan Timur Tahun 2019-2021 (Orang)

	2019	2020	2021
Kab. Ciamis	697.817	616.645	701.273
Kab. Garut	2.851.809	1.907.101	357.324
Kab. Pangandaran	3.227.296	3.940.506	3.604.128
Kab. Tasikmalaya	1.449.314	65.951	590.908
Kota Banjar	107.260	9.832	33.900
Kota Tasikmalaya	695.678	3.301	295.699

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat

Berdasarkan tabel 1.2 jumlah kunjungan wisatawan dengan angka tertinggi berada pada Kabupaten Pangandaran. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pangandaran selalu menjadi destinasi wisata terfavorit di wilayah Priangan Timur. Kemudian disusul dengan Kabupaten Garut dengan jumlah wisatawan terbanyak kedua di Priangan Timur.

Indikator lain yang tidak kalah penting adalah infrastruktur pariwisata yaitu hotel. Adanya hotel di suatu daerah bisa disebabkan karena permintaan atas jasa hotel tersebut bertambah yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak hotel maupun retribusi pembangunan jasa dan usaha. Adapun perkembangan jumlah hotel di Priangan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Hotel di Priangan Timur Tahun 2019-2021 (Unit)

	2019	2020	2021
Kab. Ciamis	17	14	13
Kab. Garut	354	354	227
Kab. Pangandaran	423	432	454
Kab. Tasikmalaya	33	42	48
Kota Banjar	9	9	9
Kota Tasikmalaya	35	35	35

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat

Pada tabel 1.3 jumlah hotel paling banyak berada di Kabupaten Pangandaran kemudian disusul oleh Kabupaten Garut. Sedangkan jumlah hotel paling sedikit berada pada Kota Banjar yang juga mempunyai jumlah hotel yang tetap selama tiga tahun terakhir.

Untuk menunjang kegiatan berwisata tentunya dibutuhkan sarana pendukung yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, salah satunya restoran. Restoran merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan wisatawan untuk memenuhi kebutuhan pangan selama berwisata di daerah wisata. Jika kebutuhan wisatawan telah terpenuhi maka wisatawan juga akan merasa senang berkunjung ke daerah wisata yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah sektor pariwisata dari pajak restoran. Adapun data jumlah restoran yang ada di Priangan Timur tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Jumlah Restoran Tahun 2019-2021 (Unit)

	2019	2020	2021
Kab. Ciamis	52	52	118
Kab. Garut	151	151	167
Kab. Pangandaran	239	240	240
Kab. Tasikmalaya	41	43	45
Kota Banjar	34	34	36
Kota Tasikmalaya	163	266	261

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, diolah

Pada tabel 1.4 jumlah restoran selama tiga tahun terakhir paling banyak berada di Kabupaten Pangandaran kemudian disusul oleh Kota Tasikmalaya. Sedangkan jumlah restoran yang paling sedikit berada di Kota Banjar dan Kabupaten Tasikmalaya.

Coronavirus merupakan penyakit pandemi yang dinyatakan oleh World Health Organization sejak 9 Maret 2020 (WHO, 2020). Covid-19 mulai terdeteksi di Indonesia sejak 2 Maret 2020, kemudian menyebar ke seluruh 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat (Pikobar, 2021). Akibat penyebaran Covid-19 yang cepat mendorong pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya penanggulangan penyebaran virus tersebut. Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 maka pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam.

Implikasi dari ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nasional yaitu kebijakan penanggulangan Covid-19 berada di pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah yang mana setiap pemangku kepentingan harus tunduk dan taat kepada kebijakan penanggulangan Covid-19 tersebut. Oleh sebab itu diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk pelarangan segala jenis aktivitas pariwisata sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/259/2020 (Herdiana, 2020). Pada situasi tersebut pemerintah baik pusat dan daerah diharapkan tetap mampu dan menunjang kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Akibatnya PAD juga menjadi hal penting dan krusial sehingga harus dioptimalkan di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi.

Terkait dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah khususnya pariwisata di Priangan Timur, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap peningkatan PAD pariwisata di Priangan Timur. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Determinasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Priangan Timur Tahun 2016-2021”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang dapat diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah restoran, dan *dummy* (Covid-19) secara parsial terhadap pendapatan asli daerah pariwisata di Priangan Timur tahun 2016-2021?
2. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah restoran, dan *dummy* (Covid-19) secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah pariwisata di Priangan Timur tahun 2016-2021?
3. Bagaimana kepekaan pendapatan asli daerah pariwisata terhadap jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah restoran, dan *dummy* (Covid-19)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah restoran, dan *dummy* (Covid-19) secara parsial terhadap pendapatan asli daerah pariwisata di Priangan Timur tahun 2016-2021.

2. Pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah restoran, dan *dummy* (Covid-19) secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah pariwisata di Priangan Timur tahun 2016-2021.
3. Kepekaan pendapatan asli daerah pariwisata terhadap jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah restoran, dan *dummy* (Covid-19).

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang harus diambil dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah pariwisata di Priangan Timur.
2. Bagi Akademisi, menghasilkan penelitian yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah pariwisata di Priangan Timur.
3. Bagi Pembaca, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan serta sumber referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah pariwisata di Priangan Timur.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dalam kajian pustaka yaitu dengan data yang digunakan merupakan data sekunder pada periode 2016-2021 (data panel) yang bersumber dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Badan Pusat

